



Membangun Argumen Tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila, Esensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Dasar Negara

Abdul Malik¹, Lisna Maulia², St.Syahral Madina²

STAI DDI Maros

almalik@staiddimaros.ac.id¹, lisnamaulia1704@gmail.com², madinahsyahral@gmail.com³

Abstrack:

This study aims to analyze the crucial role of Pancasila as the foundation of the Indonesian state and explore methods to preserve and apply Pancasila in the national and state life. The research method used is literature review, examining previous scholarly works related to Pancasila. The results show that Pancasila plays a fundamental role as the state ideology, reflecting noble values that help maintain harmony and unity in Indonesia's diverse society. Thus, the application of the values contained in each of the five principles of Pancasila should begin at an early age, through both formal and informal education, so that the younger generation can understand and practice the Pancasila ideology in daily life. The study also emphasizes the importance of the role of the government, society, and educational institutions in preserving Pancasila's relevance to address the challenges faced by Indonesia in the era of globalization. Based on these findings, it can be concluded that Pancasila is the foundation of the Indonesian state and should continue to be strengthened as a guiding principle for the life of the nation and state for all Indonesian citizens, to ensure the unity and integrity of the country.

Keywords: *Arguments, dynamics, challenges of Pancasila, essence, urgency of Pancasila, state philosophy*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penting Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan cara-cara untuk mempertahankan serta mengamalkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, yang mengkaji berbagai karya ilmiah dan penelitian terdahulu terkait Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila memiliki peran yang sangat fundamental sebagai dasar negara, karena Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur yang dapat menjaga keharmonisan dan persatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Untuk itu, penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila harus dimulai sejak dini dalam pendidikan, baik formal maupun non-formal, agar generasi muda dapat memahami dan mengamalkan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini juga menekankan pentingnya peran pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam menjaga Pancasila agar tetap relevan dan dapat mengatasi tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di era globalisasi. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat

disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang kokoh dan harus terus diperkuat sebagai panduan hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia, agar tetap terjaga kesatuan dan keutuhan negara Indonesia.

Kata Kunci: Argumen, dinamika, tantangan pancasila, esensi, urgensi Pancasila, dasar negara

PENDAHULUAN

Pancasila adalah dasar negara yang dianut oleh bangsa Indonesia (Ningsih,2021) Pancasila di dalamnya terdapat berisi lima nilai dasar yang dijadikan sebagai landasan pokok dan landasan fundamental sesuai dengan cita-cita, tujuan dan harapan terbentuknya negara Indonesia (Aminullah, A., 2023). Pancasila merupakan sebuah landasan dan pedoman utama bagi masyarakat Indonesia dalam melaksanakan segala kegiatan bermasyarakat berbangsa dan bernegara (Handayani & Dewi 2021).

Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan undang-undang 1945 alinea IV berbunyi "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial" hal ini juga didasarkan pada sisi historis (sejarah) sebagaimana ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar negara Indonesia itu disebut dengan istilah Pancasila. (Unggul, dkk., 2022).

Sejak Pancasila disahkan melalui Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia, di mana Pancasila sebagai ideologi dasar negara, memiliki peran sentral dalam membentuk karakter dan kesadaran berbangsa bagi warga negara Indonesia (Rohani, 2019).

Ideologi Pancasila merupakan alat pemersatu dan Penguat ketahanan nasional (Zubaidi & Sutarmanto, 2019). Pancasila telah mengalami dinamika dari berbagai faktor sejarah, sosial, politik, dan ekonomi. Dinamika terjadi dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan keragaman ini memastikan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi simbol persatuan tetapi juga alat yang mampu merangkul dan menghormati keberagaman tersebut (Mihit, 2023). Tantangan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia semakin kompleks, yaitu Indonesia mengalami berbagai perubahan sosial dan politik, persoalan ideologis dan interpretasi, tantangan ekonomi dan sosial, serta kepemimpinan dan implementasi di mana tindakan pemerintah tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Hal ini semua berakar pada perjalanan sejarah dan perubahan sosial yang terjadi di negara ini (Mihit, 2023).

Pancasila baik sebagai ideologi Negara, pedoman hidup, maupun sebagai fondasi Negara Indonesia tidak terwujud secara spontan, melainkan terwujud oleh proses yang melibatkan pemikiran, refleksi yang mendalam, serta telah dipertimbangkan secara matang oleh para pendiri Negara selama periode yang cukup panjang (Aryanti, dkk., 2024). Esensi Pancasila terletak pada kemampuannya untuk menyatukan latar belakang sosial, politik, dan budaya menjadi satu kesatuan yang utuh dalam bingkai negara Indonesia (Saputra, 2021). Sedangkan, Urgensi

Pancasila sebagai dasar negara mencerminkan kebutuhan untuk menjaga kesatuan, keadilan, dan moralitas dalam berbangsa (Saputra, 2021). Pancasila tidak hanya merupakan bagian dari sejarah, tetapi juga dikatakan sebagai panduan dalam menghadapi tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila bukan hanya sekedar kumpulan nilai tetapi juga merupakan panduan yang mencerminkan kepribadian, ideologi, dan aspirasi kolektif bangsa Indonesia (Maulia, dkk., 2023). Di mana hal ini dapat dijelaskan melalui beberapa aspek penting yang menunjukkan mengapa Pancasila tetap relevan dan penting sebagai landasan negara.

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini antara lain penelitian yang dilakukan oleh (Dodo Mulia Saputra, 2021) dengan judul "Argumen Tentang Dinamika Pancasila dalam Sejarah Bangsa". Pada penelitian tersebut dibahas mengenai permasalahan yang terjadi di mana sejarah perkembangan Pancasila dalam bangsa di berbagai periode, baik Pra Kemerdekaan, Era Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. Pancasila memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Namun terdapat tantangan Pancasila sebagai dasar negara yang semakin kompleks dan mengalami perubahan sosial dan politik serta kepemimpinan tindakan pemerintah tidak sejalan dengan prinsip Pancasila (Saputra, 2021).

Meskipun penelitian tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara sudah banyak dilakukan, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam hal bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kebijakan publik, pemerintahan, dan masyarakat secara

langsung. Penelitian sering kali terbatas pada aspek normatif, tanpa memaparkan data empiris mengenai tantangan-tantangan di tengah perubahan sosial akibat globalisasi, perkembangan teknologi, dan dinamika politik dalam pelaksanaannya di berbagai sektor, seperti ekonomi, hukum, dan sosial.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia terus menghadapi berbagai dinamika dan tantangan dalam mempertahankan esensi dan urgensinya. Sebagai ideologi yang mempersatukan bangsa, agama, dan budaya, nilai-nilai Pancasila sering kali dipertanyakan (Majid, 2024). Terutama oleh generasi muda yang semakin dipengaruhi oleh ideologi-ideologi asing, baik dalam konteks politik, sosial, maupun agama. Tantangan ini semakin kompleks dengan adanya intoleransi yang bertentangan dengan prinsip kebinekaan dan gotong royong yang diusung Pancasila (Saputra, 2021). Selain itu tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi juga mempengaruhi persepsi dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, memperkuat pemahaman terhadap Pancasila menjadi sangat penting untuk menjaga keutuhan bangsa dan memastikan ideologi ini tetap menjadi panduan bagi perjalanan negara di masa depan.

Tujuan penelitian tentang dinamika dan tantangan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara ini dilakukan untuk mengetahui peran penting Pancasila sebagai dasar negara serta bagaimana menjaga atau memperkuat Pancasila sebagai ideologi negara. Memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dan dipraktikkan dalam konteks bernegara seperti sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama yang terus berubah. Serta untuk

mengidentifikasi tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi dalam upaya mempertahankan Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode studi literatur. Studi literatur itu sendiri adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan karya-karya ilmiah yang telah dipublikasikan terkait dengan topik tertentu (Salmia, dkk, 2023). Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang penelitian sebelumnya, mengidentifikasi celah pengetahuan, dan mengembangkan landasan teoretis yang kuat untuk penelitian yang sedang dilakukan.

HASIL PENELITIAN

Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara:

1. Argumen tentang Dinamika Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. Setelah Soekarno menggali nilai-nilai luhur budaya Indonesia, pada 1 Juni 1945 barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara, kemudian Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia sewaktu ditetapkannya Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada tanggal 8 Agustus 1945. Dengan bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tonggakannya, nilai-nilai

Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia (Eko Suharyanto, dkk., 2021).

Berdirinya negara Republik Indonesia yang ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sepakat pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Namun, sejak November 1945 sampai menjelang ditetapkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, Pemerintah Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal.

Setelah dilaksanakan Dekrit Presiden, Indonesia kembali diganggu dengan munculnya paham lain. Pada saat itu, sistem demokrasi liberal ditinggalkan, perdebatan tentang dasar negara di Konstituante berakhir dan kedudukan Pancasila di perkuat, tetapi keadaan tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang menghendaki berkembangnya paham haluan kiri (komunis). Puncaknya adalah peristiwa pemberontakan G30S PKI 1965. Peristiwa ini menjadi pemicu berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno yang digantikan oleh pemerintahan Presiden Soeharto.

Masa pemerintahan Presiden Soeharto, ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Menyusul kemudian diterbitkan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Namun, pemerintahan Presiden Soeharto pun akhirnya dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan UUD 1945. Beliau dianggap cenderung melakukan praktik liberalisme-kapitalisme dalam mengelola negara.

Muncul gerakan reformasi pada tahun 1998 yang mengakibatkan presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden. Namun, sampai saat ini nampaknya reformasi belum membawa angin segar bagi dihayati dan diamalkannya Pancasila secara konsekuen oleh seluruh elemen bangsa (Purnomo, 2021). Hal ini dapat dilihat dari abainya para politisi terhadap fatsoen politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan perilaku anarkis segelintir masyarakat yang suka memaksakan kehendak kepada pihak lain (Purnomo, 2021).

Tahun 2004 sampai sekarang, berkembang gerakan para akademisi dan pemerhati serta pencinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai kegiatan seminar dan kongres (Firmanto, 2019). Hal tersebut ditujukan untuk mengembalikan eksistensi Pancasila dan membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa serta menegaskan Pancasila sebagai dasar negara guna menjadi sumber hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara (Firmanto, 2019).

2. Argumen tentang Tantangan terhadap Pancasila

Pancasila pada era globalisasi dewasa ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral karena menjadi kebanggaan bangsa dan dasar negara. Oleh karena itu, Indonesia perlu waspada dan berupaya agar ketahanan mental-ideologi bangsa Indonesia tidak tergerus. Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, ekonomi, budaya, dan agama (Aulia, dkk., 2021).

Tantangan yang muncul, antara lain berasal dari deras nya arus paham-paham

yang bersandar pada otoritas materi, seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme, yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Hal ini pun dapat dilihat dengan jelas, betapa pahampaham tersebut telah merasuk jauh dalam kehidupan bangsa Indonesia sehingga melupakan kultur bangsa Indonesia yang memiliki sifat religius, santun, dan gotong-royong (Aulia, dkk., 2021).

Apabila ditarik benang merah dengan tantangan yang melanda bangsa Indonesia sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Dilihat dari kehidupan masyarakat, terjadi kegamangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi ini karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat termasuk digulirkannya otonomi daerah yang seluas- luasnya, di satu pihak, dan di pihak lain, masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Akibatnya, sering ditemukan perilaku anarkisme yang dilakukan oleh elemen masyarakat terhadap fasilitas publik dan aset milik masyarakat lainnya yang dipandang tidak cocok dengan paham yang dianutnya. Masyarakat menjadi beringas karena code of conduct yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila mengalami degradasi. Selain itu, kondisi euforia politik tersebut dapat memperlemah integrasi nasional (Mihit, 2023).
- b. Dalam bidang pemerintahan, banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintahan, baik sipil maupun militer yang kurang mencerminkan jiwa kenegarawanan. Terdapat

fenomena perilaku aparaturnya yang aji mumpung atau mementingkan kepentingan kelompoknya saja. Hal tersebut perlu segera dicegah dengan cara meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan melakukan upaya secara masif serta sistematis dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila bagi para aparaturnya (Mihit, 2023).

Tantangan terhadap Pancasila sebagaimana yang diuraikan diatas, hanya merupakan sebagian kecil saja karena tantangan terhadap Pancasila itu seperti fenomena gunung es, yang tidak terlihat lebih banyak dibandingkan yang muncul di permukaan (Solissa, 2020). Hal ini menggambarkan bahwa upaya menjawab tantangan tersebut tidak mudah. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu merespons secara serius dan bertanggung jawab guna memperkuat nilai-nilai persatuan serta kesatuan negara Pancasila sebagai kaidah penuntun bagi setiap warga negara yang terkandung dalam Pancasila, baik bagi yang berkiprah di sektor masyarakat maupun di pemerintahan (Sa'diyah & Dewi, 2022). Dengan demikian, integrasi nasional diharapkan semakin kokoh dan secara bertahap bangsa Indonesia dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan negara yang menjadi idaman seluruh lapisan masyarakat.

3. Esensi Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila secara legal formal telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Pancasila sebagai dasar negara yang diterima oleh bangsa Indonesia akan memudahkan stakeholder dalam membangun negara berdasar prinsip-

prinsip konstitusional. Menurut Mahmud M.D penerimaan Pancasila sebagai dasar negara membawa konsekuensi dengan berlakunya kaidah-kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan negara terutama dalam politik hukum nasional. Mahmud M.D mengatakan bahwa esensi Pancasila sebagai dasar negara lahir sekurang-kurangnya 4 kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya; yaitu

- a. kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa baik secara ideologi maupun teritorial;
- b. kebijakan umum dan politik hukum harus didasarkan pada upaya membangun demokrasi dan monokrasi;
- c. kebijakan umum dan politik hukum harus didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial dan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia;
- d. kebijakan umum dan politik hukum harus didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban bagi tujuan keluhuran manusia.

Sila-sila Pancasila terdapat patologi budaya Pancasila, yang bisa menghancurkan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila (Saputra, 2021). Banyak fenomena yang terjadi yang menyimpang nilai-nilai dari Pancasila yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Penyimpangan terbesar dan yang paling sulit untuk dibasmi adalah masalah KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), masalah yang seolah-olah sudah menjadi penyakit mendarah daging di Indonesia ini (Irhandayaningsih, 2022). KKN dilakukan karena kurang adanya rasa nasionalisme dalam bangsa Indonesia tersebut, dan tidak mengamalkan

Pancasila dengan baik dan benar (Irhandayaningsih, 2022).

Beberapa contoh penerapan esensi Pancasila sebagai dasar negara:

1) Sila pertama

Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya sesuai dengan agama dan keyakinan yang sejalan dengan asas kemanusiaan yang adil dan beradab (Saputra, 2021). Sila pertama sendiri yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki paham mendalam selain dalam konsep keagamaan, hal ini juga mengisyaratkan bahwa Indonesia adalah negara yang secara etis dan moral yang luhur mengakui akan keberadaan Tuhan, dan secara eksplisit tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa" (Yohana dalam (Juliana Tirza, dkk., 2022).

2) Sila Kedua

Kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya setiap warga negara telah mengakui persamaan derajat, kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan hak (Saputra, 2021). Nilai kemanusiaan yang adil mengandung makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil. Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa hakikat manusia harus adil dalam hubungan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat, bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan yang Maha Esa (Nurmalia Dewi, dkk., 2023).

3) Sila Ketiga

Persatuan Indonesia artinya setiap warga negara mengutamakan persatuan, kepentingan, kesatuan, dan juga keselamatan bangsa dan negara di atas

kepentingan pribadi golongan yang selalu harus diwujudkan, diperjuangkan, dipertahankan, dan diupayakan secara terus menerus (Saputra, 2021). Dengan persatuan Indonesia maka kita dapat menciptakan kehidupan yang berdaulat, rukun, damai, dan serasi (Fitri Lintang & Fatma Ulfatun, 2022). Selain itu, Indonesia menjadi negara yang berdasarkan asas kekeluargaan, tolong menolong atau dengan dasar keadilan sosial (Hanafi dalam (Fitri & Fatma, 2022))

4) Sila Keempat

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan artinya bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dengan bijaksana, memikirkan ketenteraman rakyat dan mengambil keputusan juga untuk rakyat dengan mengikutsertakan perwakilan-perwakilan setiap masyarakat (Saputra, 2021). Kerakyatan yang berkeadilan sosial, sekaligus ia merupakan kerakyatan yang basisnya adalah Ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan. Artinya, kerakyatan itu pertama-tama disadari oleh Ketuhanan, lalu kemanusiaan kemudian oleh persatuan. Tetapi, kerakyatan yang sama menjiwai sila keadilan sosial (Osbin Simosit, dkk., 2023).

5) Sila Kelima

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menggambarkan dalam bertindak supaya bersikap adil kepada setiap warga negara Indonesia, tanpa membedakan status sosial, suku, ras, dan bahasa sehingga tujuan dari bahasa Indonesia akan tercapai dengan keikutsertaan semua rakyat Indonesia (Saputra, 2021). Keadilan sosial menekankan pentingnya mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan bagi

seluruh warga Negara Indonesia (Abdul Jamil & Iwan, 2023).

Dari contoh diatas tampak bahwa Pancasila berperan penting sebagai dasar kehidupan bersama di Indonesia. Pancasila menghargai seluruh umat beragama di Indonesia, tanpa mengutamakan atau membedakan salah satu golongan agama. Menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara adalah tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan:

a. Pendidikan Pancasila

Pancasila harus terus diajarkan sejak dini di sekolah dan lingkungan keluarga. Pendidikan ini penting agar generasi muda memahami dan menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

b. Penegakan hukum yang adil & perlindungan HAM

Keadilan sosial dan penegakan hukum yang tegas dan tidak memihak akan memperkuat keyakinan masyarakat terhadap Pancasila sebagai ideologi negara yang mengutamakan keadilan. Serta pemerintah harus menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, agar Pancasila tetap menjadi landasan moral dalam penyelenggaraan negara.

c. Menjaga Persatuan dan Kesatuan: Menghargai

Perbedaan suku, agama, ras, dan budaya adalah inti dari sila ketiga, Persatuan Indonesia. Menghindari ujaran kebencian, intoleransi, dan diskriminasi adalah bagian penting dari menjaga nilai persatuan.

d. Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial:

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menekankan

pentingnya kesejahteraan yang merata. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan akses pendidikan, dan memastikan distribusi ekonomi yang adil.

e. Mendukung Demokrasi yang Sehat:

Mengamalkan sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, berarti mendorong proses demokrasi yang sehat, di mana suara rakyat dihargai dan keputusan diambil berdasarkan musyawarah, bukan kepentingan pribadi atau golongan.

f. Menjaga Kebhinekaan: Pancasila menghargai kebhinekaan Indonesia. Oleh karena itu,

kita perlu menjaga toleransi antar umat beragama, suku, dan budaya, serta memupuk semangat gotong royong dan solidaritas nasional. Konsistensi dalam mengamalkan nilai-nilai tersebut, Pancasila akan terus terjaga dan dapat menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara serta Pancasila semakin kuat sebagai fondasi ideologis bangsa Indonesia.

Pancasila sangatlah penting untuk diakui, dihormati, dihargai keberadaannya dan di amalkan nilai-nilainya karena Pancasila tidaklah lahir begitu saja dengan mudah. Pancasila lahir dari ide pikiran pemimpin bangsa ditengah kondisi Indonesia yang penuh tekanan, perbedaan, dan himpitan dari para penjajah yang semena-mena mengeksploitasi dan memperbudak negara Indonesia seandainya saja. Pancasila adalah alat pemersatu yang dibuat oleh para pejuang kemerdekaan untuk dijadikan sebagai pijakan, dasar dan pondasi yang biasa dikenal dengan pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara

(Julian, 2021). Pancasila dibuat berdasarkan nilai-nilai yang ada di Indonesia sehingga sangatlah cocok bagi kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara (Saputra, 2021). Bukan hanya semata untuk provokasi atau penyemangat saja dalam pengusiran penjajah, melainkan juga untuk tujuan seumur hidup bangsa Indonesialah, Pancasila itu dirumuskan (Saputra, 2021).

4. Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara

Ir. Soekarno menggambarkan urgensi Pancasila secara ringkas tetapi meyakinkan Pancasila adalah Weltanschauung, satu dasar falsafah dan juga satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala macam penjajahan terutama imperialisme (Saputra, 2021). Memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara, bisa menggunakan dua pendekatan yaitu, Pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia,

Pendekatan institusional adalah membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional. Sementara itu pendekatan sumber daya manusia terdapat pada dua aspek, yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintahan dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam mengemban tugas dan bertanggung jawab. Sehingga kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat (Saputra, 2021).

Tetapi melihat kejadian yang jauh

dari sikap penerapan nilai-nilai Pancasila pada Indonesia seperti, masyarakat yang hanya memeluk agama tertentu karena faktor mayoritas sehingga ia tidak bisa menjalani ajaran agamanya dengan baik, sikap tidak adil terhadap sesama hanya karena perbedaan suatu hal, aksi bentrok antar suku karena rendahnya kesadaran dan rasa persatuan, dan perlakuan tidak adil di beberapa tempat sosial karena faktor perbedaan RAS.

Beberapa masalah yang ada perlu pemahaman yang mendalam terhadap urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pemahaman tersebut ada tahap implementasi, yaitu tahap yang selalu memperhatikan prinsip-prinsip good governance, antara lain transparan, akuntabel, dan fairness sehingga akan terhindar dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan warga negara yang berkiprah dalam bidang bisnis, harus menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai-nilai etika bisnis yang menghindarkan warga negara melakukan free fight liberalism, tidak terjadi monopoli dan monopsoni, serta warga negara yang bergerak dalam bidang organisasi kemasyarakatan dan bidang politik. Maka Indonesia akan mencapai tujuan yang di cita-citakan seperti yang diharapkan pejuang-pejuang pada masa dulu jika rakyat Indonesia menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Saputra, 2021).

Urgensi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu:

- a. Agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah, dan
- b. Agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan

bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila.

Dengan demikian, pada gilirannya nanti cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran.

KESIMPULAN

Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan sudah sepatutnya menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia perlu menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yaitu dengan cara, pendidikan Pancasila harus diperkenalkan sejak dini, keadilan sosial dan penegakan hukum yang tegas, pemerintah menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, bekerja sama dalam menciptakan kesejahteraan, demokrasi yang sehat, serta menjaga kebhinekaan.

Dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa tidak akan lupa akan Tuhan Yang Maha Esa, yang akan membuat sikap kita menjadi lebih bermartabat dan memiliki nilai moral yang baik, selalu menjunjung tinggi nilai persatuan, selalu berusaha untuk bersikap adil dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi, gotong royong dan sikap tidak egois serta akan tercipta kehidupan yang aman, damai dan tentram, perpecahan pun tak akan terjadi jika terjadi salah paham.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminullah, A. (2023). Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Serta Tantangan Dan Solusinya. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 8(2), 408-423.
- Aryati, S., Ritonga, S. N., & Maulia, S. T. (2024). Negara Kekeluargaan Sebagai Kunci Dalam Pemahaman Pancasila. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 3(6), 12-24.
- Aulia, L. R., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Mengenal identitas nasional Indonesia sebagai jati diri bangsa untuk menghadapi tantangan di era globalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8549-8557.
- Dewi, N., Hakim, M. L., Utami, S., & Ichsan, M. (2023). Implementasi Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Dalam Berbagai Profesi Di Lingkungan Masyarakat Kota Jambi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 1(01), 56-71.
- Eko Suharyanto, S. T., Kom, M., Yunus, S. P. I., & Pd, M. (2021). Pendidikan Karakter Yang Efektif Di Era Milenial. Penerbit Adab.
- Handayani, P. A., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila sebagai dasar negara. *Jurnal kewarganegaraan*, 5(1), 6-12.
- Ikrom, M., Zania, B., & Maulia, S. T. (2023). Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Ideologi Bangsa. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 112-122.

<https://www.gamedia.com/literasi/pengalaman-nilai-nilai-pancasila/?srsrtid=AfmBOor70mIsU9jjivuKyibWAhU4c2qW9D4Pv8Ky62O-pRzQ2afWfWBY> (Diakses

- pada Rabu, 13 Nov, 2024 Pukul 14.24 WITA)
- Irhandayaningsih, A. (2021). Peranan Pancasila dalam menumbuhkan kesadaran nasionalisme generasi muda di era global. *Humanika*, 16(9).
- Julian, R. D. (2021). Urgensi pancasila dalam kajian sejarah bangsa.
- Juniarti, I.G., Furnamasari, Y.F dan Dewi, D.A. (2023). Implementasi Nilai Nilai Yang Terdapat pada Sila Kedua Pancasila Terhadap Kehidupan Bangsa. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.5(3):7273-7277
- Kuliah, M., Firmanto, F. H., Moa, A., & Th, S. (2021). Pengalaman Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia.
- Lintang, F. L. F., & Najicha, F. U. (2022). Nilai-nilai sila persatuan Indonesia dalam keberagaman kebudayaan Indonesia. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1), 79-85.
- Majid, N. K. (2024). Pancasila sebagai Landasan Etika Politik: Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi. *Action Research Literate*, 8(3), 509-516.
- Mihit, Y. (2023). Dinamika dan Tantangan dalam Pendidikan Pancasila di Era Globalisasi: Tinjauan Literatur. *Educationist: Journal of Educational and Cultural Studies*, 2(1), 357-366.
- Ningsih, I. S. (2021). Hakikat Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara.
- Rohani, E. (2019). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan dalam perspektif santri. *Almuqsith Pustaka*.
- Saputra, D. M. (2021). *Argumen Tentang Dinamika Pancasila Dalam Sejarah Bangsa*.
- Saputra, D. R. (2021). *Esensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Dasar Negara*. Makalah: STIE Keuangan Perbankan dan Pembangunan, Lubuk Pinang.
- Saputra, R. D. (2021). Pendidikan Pancasila. https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:AVgPaIGVxU0J:scholar.google.com/+Saputra+r+d+pendidikan+Pancasila+&hl=id&as_sdt=0,5 (Diakses pada Selasa, 12 Nov 2024)
- Samosir, O., Tinambunan, L., & Septiandry, R. (2023, May). Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Himat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan: Tinjauan Filosofis atas Demokrasi dari Sila IV Pancasila. In *Seminar Nasional Filsafat Teologi* (pp. 53-63).
- Sarifuddin, A. J., & Joesoef, I. E. (2023, November). Implementasi Keadilan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) Indonesia. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 5, No. 1, pp. 21-30).
- Sa'diyah, M. K., & Dewi, D. A. (2022). Penanaman Nilai-Nilai Pancasila di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 9940-9945.
- Solissa, A. B. (2020). Etika anak bangsa perspektif Pancasila. *Refleksi Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam*, 20(2), 134-158.

- Tirza, J., Cendana, W., & Araini, T. K. (2022). Pendidikan anak usia dini tentang toleransi beragama sebagai implementasi sila pertama pancasila. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 7(1), 101-108.
- Unggul, A. R. P., Ajati, D. T., Saputra, R. W., & FITRIONO, R. A. (2022). *Pancasila Sebagai Dasar Negara*. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(04), 25-31.
- Zubaidi, A., & Sutarmanto, H. (2019). *Indeks ketahanan ideologi pancasila*. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(2), 277-294.